

UNISIA

SARA: Potensi atau Konflik?

SARA: Formulasi Kebhinekaan
dalam Perspektif Hukum
Jawahir Thontowi

Konstruksi SARA, Kemajemukan dan Demokrasi
Heru Nugroho

Cara-cara Menyelesaikan Sengketa
dalam Masyarakat Pedesaan di Indonesia
H. Shri Ahimsa-Putra

Konflik Sosial di Asia Tengah Akhir Abad ke-20
(Perang Sipil Tajikistan)
Stphane A. Dudoignon

Konstruksi SARA, Kemajemukan dan Demokrasi

Heru Nugroho

Has a matter pertaining ethnic, religious, and racial relations been given? Has it been a forbidden area to enter and discuss? In fact the discourse of it has been unavoidable in social life, and even many government policies have led to it. Therefore, it is important to pose the matter on a respected position, as a unification instrument.

Prolog

S elalu saja ada yang disembunyikan ketika muncul persoalan yang bersumber dari isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan, yang populer dengan istilah SARA. Berbagai konflik, kerusuhan dan kekerasan yang terus-menerus berlangsung di berbagai daerah, baik dalam skala yang relatif kecil maupun tergolong besar, SARA selalu saja dijadikan sebagai kambing hitam penyebab ragam problema sosial di tengah-tengah masyarakat itu. Ironisnya, popularitas SARA sebagai sumber gejala sosial tersebut tidak pernah dibahas secara terbuka, apalagi tuntas, di tingkatan publik. Justru sebaliknya, perdebatan yang mengarah pada topik itu terus dibatasi. Begitu mudahnya persoalan-persoalan pertikaian besar segera saja menguap tatkala diintervensi oleh stigma SARA. Nampaknya, sebagai sebuah wacana, SARA telah menempati wilayah yang sangat elitis, hanya mampu ditembus, atau dimanipulasi oleh elit-elit penguasa.

Gejala elitisasi, atau boleh saja dimaknai politisasi SARA itu, misalnya saja secara meyakinkan telah dieksperimentasi sepanjang orde baru berkuasa. Istilah ini telah pula berhasil menjadi benteng tangguh bagi negara dalam meredam berbagai bentuk perlawanan rakyatnya. Apa pun isu dan tuntutan. Misalnya, tindakan-tindakan protes atas operasi kekuasaan yang berlangsung secara korup, nepotis dan kolusif (KKN) yang menghasilkan perluasan ketimpangan struktural sekalipun, senantiasa dijawab oleh negara sebagai isu SARA. Implikasinya, justifikasi SARA sebagai wacana tersembunyi dan misteri ini telah berhasil meringkus dan mendomestikasi kesadaran rakyat atas persoalan yang sesungguhnya. Pertentangan di Sanggau Ledo, kasus kerusuhan massal di Ambon, gejolak di Timor-timur, Medan, Flores, dan di Ujung Pandang, untuk menyebut beberapa kasus, tidak pernah mendapatkan penjelasan secara memadai, kecuali hanya dialirkan pada masalah SARA.

Nampaknya, reproduksi wacana SARA sebagai instrumen manipulasi kepentingan kekuasaan hampir mengalami transformasi di tingkatan masyarakat, bahkan telah mengalami pelembagaan (*institutionalization*) bahwa SARA adalah wacana yang "haram" diberbincangkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana SARA dikonstruksikan berkaitan dengan kepentingan politik? Apa hubungan konstruksi SARA bagi munculnya tindakan kekerasan yang kian masif? Bagaimana SARA dipahami berkaitan dengan struktur masyarakat yang demikian majemuk seperti yang terjadi di Indonesia?

Tulisan ini secara berturut-turut akan menjawab pertanyaan itu. Diawali oleh pembahasan epistemologi konstruksi SARA melalui pengkaitan kepentingan dan interpretasi, implikasi penafsiran SARA versi negara, kecenderungan pada struktur masyarakat majemuk dan masa depan bagi Indonesia, sebelum diakhiri dengan catatan kritis, untuk tidak mengatakan sebagai rekomendasi.

Konstruksi SARA

Gagasan Derrida (1978) tentang metode interpretasi atas sebuah teks, wacana, dan peristiwa yang kemudian populer dengan *deconstruction*, nampaknya telah mengilhami lahirnya tesis keterkaitan antara kepentingan (*interest*) dan metode penafsiran (*interpretation*). Pilihan atas cara individu, kelompok maupun rezim dalam menginterpretasikan fenomena sosial, atau politik sekalipun memang tidak dapat dilepaskan dari dorongan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, sebuah pepatah konservatif yang mengatakan "metode interpretasi bersifat netral, dan yang tidak netral adalah penggunaannya", telah mengalami erosi dari sudut epistemologi. Dalam prakteknya, setiap kepentingan—seringkali bersifat politis—akan mendorong penggunaan metode

interpretasi tertentu, metode yang mendukung kepentingan tersebut. Dalam konteks ini Derrida menegaskan bahwa interpretasi bersifat sewenang-wenang, sehingga setiap orang, kelompok dan rezim berhak melakukan interpretasi atas teks. Tesis ini relevan dengan pemikiran Habermas (1972), yang dengan jitu merumuskan sebuah hipotesis, "terdapat kaitan strategis antara pengetahuan manusia (baik empiris-analitis, historis-hermeneutik, maupun kritis) dengan kepentingan (teknis, praktis, atau emansipatoris)." Kendatipun, tidak dapat diingkari bahwa secara praktis yang berlangsung bisa juga sebaliknya, yaitu pengetahuan merupakan produk dari kepentingan.

Pengetahuan yang dimaksud dalam permasalahan ini dapat meliputi sebuah konsep, kesadaran umum maupun wacana publik. Ketiga hal ini secara fenomenologis merupakan konstruksi sosial (*social construction*) dari masyarakat tertentu.¹ Permasalahan mendasar dalam sebuah sistem sosial adalah, pihak mana atau siapa yang berkepentingan paling dominan dalam penciptaan wacana publik tersebut. Negara atau masyarakat? Gramsci (1971) misalnya, menyebutkan bahwa institusi negara melalui instrumen pemaksa—seperti birokrasi, administrasi dan militer—memiliki kapabilitas dalam melakukan dominasi

¹Realitas sosial berupa pengetahuan yang bersifat keseharian, seperti konsep, kesadaran umum dan wacana publik, menurut Berger dan Luckman merupakan hasil dari konstruksi sosial. Realitas itu dikonstruksikan melalui proses eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Konstruksi sosial tidak berlangsung dalam ruang hampa tetapi penuh dengan berbagai kepentingan politik. Lihat: Peter Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction of Reality*, London: Penguin Books, 1984, hal. 31-62.

politik. Akibatnya, tercipta hegemoni kesadaran individu pada setiap warga masyarakat. Wacana yang dimunculkan oleh negara akhirnya dapat diterima dengan mudah oleh warga. Marcuse (1964) menyebutnya fenomena seperti ini sebagai "*desublimasi represif*". Orang merasa puas dengan wacana yang dimunculkan oleh negara meskipun wacana tersebut secara intelektual dan kultural bersifat menindas masyarakat. Di dalam perdebatan postmodernisme (Lash, 1990), dijelaskan bahwa gejala seperti itu tidak lain sebagai produk dari keberadaan rezim pemaknaan (*regime of significance*) yang cenderung melakukan dominasi dan hegemoni makna atas berbagai peristiwa, pengetahuan, kesadaran dan wacana. Rezim di sini itu adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan formal sebagai representasi dari penguasa negara. Oleh karena itu, meminjam istilah Heryanto (1997), negara seyogyanya juga tidak dapat luput dari bidikan sebagai "tersangka" dalam proses penguasaan makna tersebut.

Bagaimana dengan konstruksi SARA? Dalam konsep SARA tertuang pengertian konflik horisontal yang dimotori oleh suku, agama dan ras dan juga konflik vertikal yang bersumber pada perbedaan "ekonomi-politik" antargolongan (Taufik Abdullah, 1997). Rentetan kerusuhan yang timbul beberapa waktu lalu, dan bukan mustahil potensial akan terus terjadi, yang mengakibatkan kerusakan berbagai fasilitas umum seperti toko-toko milik Non-pribumi, rumah-rumah ibadat, sarana transportasi, serta perusakan fasilitas publik lainnya senantiasa dipahami oleh *the power holders* dalam konteks SARA. Mereka cenderung tidak pernah beranjak dari perspektif yang diyakininya dalam memahami penyebab kerusuhan, kecuali SARA selalu dijadikan sebagai tersangka utama dan kausa prima dari gejala sosial tersebut. Konstruksi sosial tentang makna SARA

dalam masyarakat lebih didominasi oleh perspektif rezim. SARA dianggap sumber perpecahan sosial, karenanya ia menjadi suatu pengetahuan atau realitas yang ditabukan. SARA oleh mereka selalu dilihat sebagai sebuah potensi konflik daripada energi politis yang dapat mewujudkan demokrasi dan kemajemukan sosial.

Gejala ini memang sangat ironis. Di satu sisi sistem nilai yang diyakini sebagai ideologi resmi negara mengakui adanya pluralitas SARA, bahkan pluralitas itu dianggap sebagai penyokong terwujudnya masyarakat Indonesia yang majemuk di bawah slogan "Bhinneka Tunggal Ika". Namun di sisi lain, praktik itu tidak pernah terimplementasi. Terjadi diskrepansi antara sistem nilai atau ideologi (dunia kesadaran) dengan praktek politik keseharian (dunia riil). atau tengah terjadi kesenjangan antara what ought to be dan what is.

Penafsiran SARA versi Negara

Dalam dua sampai empat tahun terakhir ini, serentetan amuk massa banyak terjadi di masyarakat. Kurun waktu 1995 sampai 1999 telah terjadi kerusuhan yang melibatkan amuk massa seperti perusakan yang dilakukan oleh petani di Jenggawah, perusakan Pengadilan Negeri di Kediri, perusakan TOSERBA oleh umat Islam di Purwakarta dan Pekalongan, pembunuhan atas seseorang oleh sekelompok anak muda umat Katholik terhadap seseorang yang dianggap melecehkan agama di Nusa Tenggara. Tahun 1996 rentetan amuk massa belum juga mereda, misalnya massa pecinta musik rock Iwan Fals yang mengamuk di Bandung, perusakan gereja di Surabaya dirusak oleh massa, tragedi berdarah 27 Juli'96 yang berakibat hancurnya PDI, perusakan gedung Serbaguna di Jati Bening, perusakan sarana ibadah di Situbondo, hancurnya kantor polisi dan fasilitas

umum oleh umat Islam di Tasikmalaya, kerusuhan etnis Dayak *versus* Madura di Sanggau Ledo. Pada tahun 1997 tercatat beberapa kerusuhan merambat ke kota-kota kecil, di antaranya di Rengasdengklok terjadi keberingasan massa akibat sertimen agama dan etnis, di Temanggung terjadi perkelahian antara Banser NU melawan PP dan AMPI, di Banjarnegara terjadi perkelahian antara serombongan pemuda bersepeda motor dengan sopir kendaraan umum, dan banyak lagi yang lain.

Kampanye politik menyambut Pemilu 1997 juga tidak luput dari berbagai bentuk kekerasan dan keberingasan massa yang diwarnai sentimen SARA. Di Yogyakarta misalnya, terjadi berbagai tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh massa peserta kampanye Golkar terhadap kantor DPC PPP, penyerbuan terhadap kampus UII, perusakan atas masjid di kampus IAIN, dan lain-lain.² Rangkaian peristiwa itu telah melahirkan sejumlah analisis tentang akar penyebab kerusuhan dan keberingasan sosial yang terjadi secara beruntun.

Oleh negara, semua itu cenderung dikonstruksikan berkaitan dengan SARA. Secara sadar atau tidak, para pejabat cenderung memahami bahwa Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan merupakan potensi konflik yang setiap saat dapat meledak dengan *trigger* yang bermacam-macam. Misalnya, pemicu kerusuhan di Tasikmalaya adalah masalah Agama. Kausa prima dari kerusuhan yang mengakibatkan pembantaian massal di Sanggau Ledo adalah masalah Suku, yaitu perkelahian massal antara suku Madura (transmigran) *versus* Dayak (penduduk lokal). Sedang perkelahian di kota Temanggung, yaitu NU, PP, AMPI dan peristiwa kerusuhan dalam kampanye politik di Yogyakarta berakar pada persoalan antargolongan.

Selebihnya, para aparaturnegara umumnya menegaskan bahwa ada pihak ketiga

yang berupaya menunggangi dan sengaja memancing munculnya kekeruhan sosial, tanpa pernah ada argumen dan hasil yang tuntas serta konkret, siapakah sebenarnya pihak ketiga tersebut. Pihak ketiga itu cenderung dijadikan kambing hitam, mendapat "label" bahwa mereka adalah komunis yang menyusup dengan menjadikan agama sebagai kuda tunggangan dalam rangka mencapai tujuan politik tertentu. Penguasa senantiasa memberi pagar yang kuat dalam membangun argumen dan kepentingan, yakni atas nama stabilitas politik. Akibatnya, kerusuhan sosial tersebut bukannya didiskusikan secara jernih dan tuntas, untuk mencari resolusi konflik secara terbuka dan demokratis, namun justru ditenggelamkan.

Para pengamat sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan mencoba mencari penjelasan kerusuhan sosial dari perspektif yang berbeda dengan cara memberikan wacana alternatif. Umumnya mereka sepakat bahwa rentetan kerusuhan sosial yang terjadi di berbagai wilayah di Nusantara merupakan akibat kegagalan ideologi pembangunan. Mulai dari kesenjangan sosial, iklim politik yang tidak demokratis, lembaga peradilan yang gagal mewujudkan jaminan keadilan, serta terjadinya penyumbatan komunikasi politik antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*). Situasi sosial yang cenderung "monolitik" telah memproduksi ketimpangan sosial, berupa membengkaknya konglomerasi, kolusi, korupsi, oknum di sekitar *inner circle* kekuasaan yang berusaha mencari rente, bisnis keluarga pejabat yang mendasarkan pada fasilitas negara dan nepotisme. Rupanya keadilan telah menyayat masyarakat menyebabkan

² Informasi tentang peristiwa tawur massal pengrusakan, dan penyerbuan terhadap fasilitas publik dapat dilacak di harian pagi **Bernas** edisi-edisi bulan Mei 1997.

munculnya fenomena marginalisasi sekelompok atau lapisan sosial di mana-mana. Mereka adalah kelas sosial yang tidak memiliki akses menyuarkan aspirasinya, baik dalam pengertian ekonomi, sosial dan politik. Marginalisasi ini terlihat jelas pada kasus pemberontakan petani di Jenggawah, perilaku beringas etnis Dayak di Sanggau Ledo, frustrasi pedagang tradisional di Tasik Malaya, amuk pedagang kaki lima di Tanah Abang, kebrutalan orang Asli Irian di sekitar proyek freeport, dll. Karenanya, menjadi mudah dipahami jika muncul langkah-langkah pragmatik dalam bentuk kekerasan dengan eskalasi yang berarti.

Argumen para pengamat sosial tersebut adalah berupaya mendeskripsikan akar-akar persoalan amuk massa secara mendasar, memahami dengan kepentingan emansipatoris, dan mencari jalan keluar secara praktis lewat kelenturan politik yang mengarah pada demokratisasi. Pendekatan seperti ini relatif bisa dimengerti karena memang berbagai informasi sosial-ekonomi menunjukkan kesenjangan antardaerah dan kelompok yang cukup signifikan untuk munculnya fenomena disintegrasi sosial tersebut. Akan tetapi, jika dicermati secara mendalam, terdapat satu wacana yang nampaknya belum memperoleh perhatian serius yaitu dengan menggunakan perspektif sosiologi pengetahuan (Berger dan Luckmann, 1984) tentang konstruksi sosial SARA yang dilakukan oleh negara. Ada kesan umum yang difahami melalui jalan pikiran orang-orang awam bahwa SARA merupakan sebuah potensi yang dapat menciptakan berbagai konflik sosial. Bahkan negara selalu mengkonstruksikan bahwa SARA merupakan unsur yang dapat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa sehingga harus selalu diwaspadai.

Kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari unsur-unsur yang ada di dalam pengertian SARA dianggap sebagai

sesuatu yang *given* dan tidak perlu didiskusikan lebih lanjut. Perbedaan di antara elemen-elemen SARA merupakan takdir sebuah bangsa dan membicarakan perbedaan tersebut sama artinya menciptakan perpecahan itu sendiri karena "seolah-olah" telah ingkar dari takdir. Misalnya, diskusi tentang ketimpangan etnis cenderung ditabukan karena akan menciptakan perpecahan yang berbau SARA. Hingga saat ini tidak pernah ada diskusi apalagi jawaban tuntas, mengapa orang-orang Dayak "menjadi" lebih marginal dari etnis Jawa, mengapa kaum pendatang Cina, Bugis dan Padang di Timor Timur mendominasi perdagangan, mengapa minoritas Cina di tanah air menjadi mayoritas penguasa ekonomi, dan lain-lain. Apalagi, mendiskusikan tentang "kebenaran" agama, hal itu sangat ditabukan karena dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Harus diakui bahwa setiap agama memang mengabarkan dan memiliki kebenaran sendiri-sendiri, tetapi yang harus disadari adalah manusia memiliki keterbatasan dalam memahami kebenaran tersebut. Sehingga solusi yang bijaksana adalah perlunya mendiskusikan kebenaran lintas agama menjadi sesuatu yang mutlak dan perlu.

Berdasarkan kenyataan tersebut dapat ditegaskan bahwa pada satu sisi wacana tentang SARA yang muncul dalam masyarakat cenderung ditabukan, namun ironisnya pada sisi lain kebijakan publik secara nyata maupun terselubung menciptakan problema SARA itu sendiri. Contoh konkret lainnya adalah terjadinya pembangunan wilayah yang timpang antara Jawa dan luar Jawa, antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, diskriminasi di sektor ekonomi terhadap pribumi dan pengusaha kecil, dll. Ketimpangan secara struktural itu, jika ditelaah secara mendalam justru berpeluang untuk dimasukkan pada aliran konflik SARA. Oleh karenanya, pemaknaan se-

pihak atas pengertian dan wacana SARA yang dilakukan oleh *the power holders* cenderung menciptakan "api dalam sekam" yang sewaktu-waktu dapat meledak.

Nampaknya, hipotesis bahwa menenggelamkan wacana SARA dapat dipandang sebagai sebuah pengalihan isu politik mendasar, yaitu problema demokrasi dan keadilan, menjadi penting untuk diperhatikan. Karenanya, untuk upaya menghindari proses manipulasi wacana yang berdampak pada berbagai keresahan sosial, gejala masyarakat, amuk massa yang semuanya mengarah pada disintegrasi sosial yang berkepanjangan diperlukan wacana alternatif tentang SARA. Wacana tersebut, hendaknya memunculkan isu SARA dalam dimensi yang tidak *one sided* tetapi secara seimbang. Artinya, memahami wacana SARA baik dari sisi negatif dan juga sebanding dengan sisi positifnya. Langkah ini tidak lain merupakan bentuk, apa yang diistilahkan oleh Gramsci (dalam Femia) sebagai, *counter hegemony*³, atas SARA yang dikonstruksikan oleh negara.

SARA dan Kemajemukan

Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan atau menjadi sebuah akronim yang disebut SARA adalah realitas sosial yang tidak dapat dielakan oleh siapa pun, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Realitas ini telah menjadi nasib bagi setiap masyarakat di mana pun masyarakat itu berada. Kenyataan sosial menegaskan bahwa masyarakat-masyarakat di dunia ini terdiri dari berbagai macam etnis, agama dan golongan. Kenyataan seperti itu tidak jarang menciptakan problem sosial seperti masalah konflik dan disintegrasi, tetapi pada sudut lain (berdasarkan temuan-temuan historis) SARA justru dijadikan arena pemberdayaan dan demokrasi. Indonesia penduduknya saat ini kurang lebih 200 juta

orang dan terdiri dari multi etnis (Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian) yang masing-masing masih dibagi lagi ke dalam sub-subetnis seperti Sunda, Batak, Dayak, Padang, Amungme, dll. Selebihnya, agama juga terdiri dari bermacam-macam, mulai dari Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, agama lokal, dan aliran-aliran kepercayaan. Elemen-elemen dalam SARA tidak selalu terpisah secara kaku tetapi ada kemungkinan terjadi apa yang oleh seorang sosiolog Peter Blau (1964) dinamakan *cross cutting affiliation*. Misalnya, terdapat orang-orang yang berbeda ditinjau dari etnis, tetapi disatukan dalam agama, ekonomi, dan kepentingan yang sama. Kendatipun etnis Batak dan Cina berbeda, tetapi kadang disatukan karena mereka pemeluk agama Protestan dan sama-sama berdagang. Selain itu, masih banyak lagi kelompok-kelompok kepentingan yang berkembang dalam masyarakat dari sekadar untuk reuni dan kangen-kangenan, hingga kelompok strategis yang memiliki interest mempertahankan *status quo*. Elemen itu dapat berpeluang sebagai konflik sekaligus kekuatan integratif.

Mengingat SARA merupakan realitas sosial maka keberadaannya tidak dapat dilenyapkan. Bahkan setiap upaya menguburnya, dengan dalih apa pun, termasuk menuju unifikasi melalui "monolitisasi" masyarakat, cenderung akan menimbulkan keresahan, gejala sosial, kerusuhan massa, dan pasti berakhir dengan disintegrasi sosial. Kemajemukan masyarakat (*plures*) tidak dapat diseragamkan demi jargon persatuan (*unum*), sebab persatuan sendiri,

³Joseph V. Femia, *Gramsci's Political Thought, hegemony, consciousness, and the revolutionary process*, Clarendon Press, Oxford, 1987.

sebagaimana diungkapkan Berger dan Neuhaus, 1977, harus dicapai lewat keberadaan pluralitas. Contoh paling konkrit adalah politik *apartheid* yang dilakukan oleh rezim kulit putih di Afrika Selatan telah menghasilkan pergolakan sosial yang berkepanjangan dan pertumpahan darah yang memakan banyak korban jiwa.

Memahami realitas historis seperti diungkapkan di atas, maka ideologi dan perspektif dalam memahami SARA harus didekonstruksi, yaitu dari SARA sebagai sumber pemicu perpecahan menjadi SARA sebagai kekuatan untuk pemberdayaan dan demokrasi masyarakat. Namun langkah pembalikan perspektif saja tidak cukup sebab dibutuhkan supra dan infra-struktur politik yang memadai dan mendukung proses itu. Salah satu caranya adalah dengan menempatkan peran negara sebatas sebagai fasilitator, dinamisator dan stabilisator kekuatan-kekuatan yang ada dalam komponen-komponen SARA. Jelas, di dalam setiap elemen SARA masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda atau bahkan secara diametral dapat berbenturan. Pada titik inilah negara berupaya menjembatani atau mengakomodasi setiap tabrakan kepentingan tersebut, bukan melakukan intervensi yang sangat ideologis dan dominatif. Namun demikian, tuntutan peran tersebut hanya dapat direalisasi kalau negara betul-betul *embedded* dalam masyarakatnya sehingga setiap kebijakan yang ditelurkan selalu mewakili masyarakatnya. Dengan kalimat lain peran tersebut hanya bisa terjadi dalam negara yang sistem politiknya demokratis. Dalam sebuah negara yang monolitik maka realitas SARA cenderung dilenyapkan, tentu saja demi keutuhan sebuah rezim, lewat kekuatan dominan atau bahkan salah satu elemennya —misalnya agama— dikooptasi dan didepolitisasi. Contohnya, agama tidak boleh digunakan untuk sarana berpolitik,

tetapi kenyataannya, oleh penguasa agama tidak jarang digunakan sebagai alat memobilisasi rakyat demi kepentingan rezim.

Perspektif yang memahami SARA sebagai energi pemberdayaan dan demokrasi masyarakat memiliki hulu teori pada pemikiran Peter Berger dan Richard Neuhaus (1977) tentang "*mediating structures*" atau peran institusi-institusi mediasi dalam proses pemberdayaan dan demokrasi. Mereka sepakat bahwa, institusi-institusi mediasi yang secara konkret dapat meliputi kelompok ketetanggaaan, agama, etnis, keluarga atau *trah*, dan kelompok keswadayaan (termasuk kelompok kepentingan) dapat dimanfaatkan sebagai proses pemberdayaan (*empowering*) masyarakat dalam rangka menghadapi realitas makro atau kebijakan publik. Individu-individu akan merasa tidak berdaya (*powerless*) dalam menyalurkan aspirasinya bila berdiri sebagai person dalam menghadapi negara dan kebijakan-kebijakannya yang impersonal. Mereka akan merasa lebih berdaya kalau menyalurkan kepentingannya lewat institusi-institusi mediasi karena dalam institusi itu sifat personal masih diakui, atau masih ada pengakuan terhadap identitas person, sedang realitas publik sangat impersonal. Berdasarkan kerangka berfikir seperti itu maka elemen-elemen yang ada dalam SARA juga merupakan institusi-institusi mediasi yang dapat dimanfaatkan sebagai pemberdayaan dalam rangka demokratisasi politik.

Temuan-temuan sejarah dan hasil-hasil deskripsi para ahli sosiologi-antropologi telah membuktikan bahwa institusi-institusi mediasi bermanfaat untuk proses pemberdayaan masyarakat dalam rangka menuju kemajemukan dan demokrasi. Pada masa penjajahan pemerintah Hindia Belanda banyak orang-orang pribumi yang menggunakan institusi mediasi dalam bentuk SARA, misal etnis, sebagai sarana perjuangan pe-

nyaluran aspirasi politik. Secara individual mereka tidak berdaya dalam menghadapi kebijakan pemerintah kolonial maka digunakanlah etnis sebagai alat perjuangan. Sebagai contoh pada masa kolonial pemuda-pemuda Nusantara berjuang lewat media etnis dengan membentuk Jong Java, Jong Sumatra, Jong Celebes, Jong Ambon, dll. Mediasi agama juga digunakan oleh pedagang-pedagang Islam yang merasa dianaktirikan oleh pemerintah kolonial dengan memberi konsesi pada pedagang Cina maka mereka mendirikan Serikat dagang Islam. Contoh kontemporer yang dapat diungkapkan adalah peran institusi gereja Katholik di Timor Timur dalam proses integrasi. Banyak pemuda-pemuda yang terluka akibat bentrokan dengan aparat tidak dilarikan oleh masyarakat ke RSU tetapi ke gereja, sebab bagi masyarakat Timor Timur gereja dirasa memberikan perlindungan spiritual dan politik terhadap individu dan sekaligus dijadikan sebagai alat perjuangan politik.

Masih banyak contoh di belahan dunia lain, seperti gerakan Black Moslem di Amerika Serikat, peran gereja Katholik dalam terwujudnya gerakan *people power* di Filipina yang menumbangkan penguasa otoriter Marcos, Ordo Fransiska yang melawan kekuasaan kejam di Amerika Latin, gerakan Islam di kepulauan Moro, dll. Secara sederhana dapat dipahami bahwa banyak contoh yang dapat dikemukakan bahwa elemen-elemen yang ada di dalam SARA merupakan institusi mediasi yang bermanfaat untuk menyuarakan dan aktualisasi politik. Dari contoh yang sifatnya internasional hingga lokal seperti munculnya asosiasi pedagang kecil yang beranggotakan di bawah kelompok pengajian dalam rangka menghadapi rentenir (Nugroho, 1997), dll. Meskipun demikian tidak ada jaminan bahwa institusi SARA ini dapat secara penuh digunakan sebagai sarana

pemberdayaan karena semuanya berpulang kepada bagaimana peran negara. Apakah ia berperan sebagai fasilitator, dinamisator atau kooptator? Apakah dia memiliki ciri yang demokratis atau monolitik? Maka hipotesis sementara yang dapat diturunkan dari wacana ini adalah, "sebuah negara yang memiliki ciri-ciri demokratis cenderung akan berperan sebagai fasilitator dan memanfaatkan institusi SARA sebagai kekuatan masyarakat dalam rangka pemberdayaan melalui pluralisme," sementara itu "sebuah negara yang memiliki ciri-ciri monolitik cenderung akan mengeksploitasi institusi SARA sebagai sarana kooptasi dan mobilisasi massa demi kepentingan rezim penguasa".

Kemajemukan dan Demokrasi Indonesia

Struktur masyarakat majemuk, sebagaimana masyarakat Indonesia, pada dasarnya tidak bisa ditafsirkan sebagai ancaman bagi kohesivitas sosial. Sebaliknya justru menjadi potensi besar pembentukan masyarakat yang demokratis, yang dicirikan terbangunnya *civil society*. Tentu saja, harapan itu akan menjadi kenyataan jikalau terpenuhi beberapa bentuk persyaratan. Persyaratan itu berupa adanya pengakuan secara substansial —baik dari pemegang kekuasaan, masyarakat umum, maupun kelompok sosial, politik dan kebudayaan— bahwa konsep dan realitas SARA merupakan energi sosial dalam mewujudkan masyarakat yang pluralistik dan demokratis. Pengandaian adanya *political will* dari pemegang kekuasaan dalam meletakkan supra dan infrastruktur politik yang mengakui adanya pluralisme pada dasarnya tidak akan berarti jika tanpa dilandasi oleh beberapa hal berikut. *Pertama*, perimbangan wacana publik secara seimbang. Masyarakat dari golongan dan lapisan mana pun

diberi hak untuk ikut terlibat dalam perdebatan atau diskusi publik tentang SARA, tanpa harus ada pemaksaan makna dari negara terhadap masyarakat sipil. Hal itu berarti, menarik agak jauh peran negara secara dominatif dalam mengkonstruksikan SARA. *Kedua*, meyakinkan bahwa SARA selain berpeluang menciptakan konflik (hal ini cenderung terjadi dalam iklim politik yang monolitik) tetapi juga dapat menjadi energi dalam mewujudkan proses pemberdayaan atau demokrasi (hal ini cenderung terjadi dalam iklim politik yang liberal). *Ketiga*, kenyataan ini sesungguhnya memberikan isyarat bagi otonomi kepada masyarakat, dari cara berfikir sampai bertindak melalui penyemaian media-media komunikasi di tingkat lokal sebagai basis pembentukan kesadaran.

Tanpa persyaratan tersebut pluralisme masyarakat Indonesia yang tertuang dalam cita-cita "Bhineka Tunggal Ika" hanya akan tinggal dalam utopia, sebab yang akan hadir dalam pentas sosial politik sehari-hari secara riil adalah kenyataan "kemajemukan masyarakat yang sebatas jargon yang dimunculkan oleh negara, tetapi kenyataannya justru ingkar dari jargon tersebut". Dengan demikian, SARA yang difahami sebagai energi yang mengandung kekuatan konflik tanpa memperhitungkan SARA sebagai potensi demokrasi. Pandangan pluralisme dalam pengertian substansial ada dalam ungkapan latin, yaitu "*E Pluribus Unum*". Ungkapan tersebut mengandung pengertian bahwa pengakuan terhadap kemajemukan SARA atau masyarakat cenderung akan mencegah tindakan politik yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh sebuah kelompok -bisa berupa rezim politik, kelompok kepentingan, suku, agama dll. Pandangan seperti ini bila diamalkan dalam kehidupan politik yang konkret akan menghindarkan masyarakat dari sebuah mekanisme *zero-sum game*, karena keme-

nangan tidak hanya dinikmati oleh salah satu kelompok saja tetapi oleh semua pihak yang terlibat proses negosiasi politik.

Argumen di atas lebih didasarkan pada realitas empiris bahwa kesatuan (*unum*) mustahil dicapai melalui pengorbanan atas kemajemukan (*plures*), dari pada jargon yang selama ini sering didengung-dengungkan. Harus diakui bahwa dalam sebuah masyarakat yang sepakat menganut faham politik pluralis cenderung akan terjadi ketegangan yang bersifat permanen dari berbagai kekuatan dialektik yang ada di dalam komponen-komponen SARA. Namun bila ketegangan itu dibingkai dalam sebuah sistem politik yang demokratis maka yang akan terjadi transfer energi konflik ke dalam fenomena diskusi publik, "perselisihan" antar keyakinan ideologi atau paradigma, dan debat dalam parlemen yang hangat. Semua perselisihan cenderung akan menghasilkan kesepakatan. Namun perlu diakui bahwa kesepakatan hanya merupakan satu fase dari dialektika dalam masyarakat demokratis. Oleh karenanya, liberalisasi, demokrasi dan pluralisme adalah merupakan sebuah proses sosial yang tidak melarikan diri dari partikularitas. Sebab merupakan sebuah upaya dalam menyingkap partikularitas secara sehat dan wajar sehingga mendaftarkan pendewasaan politik di tanah air. Jadi analisis ini menawarkan sebuah upaya pembalikan wacana dari "wacana pluralisme sebagai energi destruksi sosial" menjadi "wacana SARA sebagai kekuatan untuk mempromosikan pemberdayaan dan demokrasi masyarakat". Akhirnya, tidak ada alasan menutup-nutupi SARA sebagai realitas sosial, jikalau tidak ingin meunifikasi struktur masyarakat Indonesia yang demikian majemuk seperti sekarang ini. Di sanalah kepentingan kita atas demokrasi terus-menerus diuji. Semoga. □

Daftar Acuan

- BERGER, Peter L. & Richard J. Neuhaus. *To Empower People: The Role of Mediating Structures in Public Policy*, Washington: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1977.
- BERGER, Peter L. & Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, London: Penguin, 1984.
- BLAU, Peter M. *Exchange and Power in Social Life*. New York: Wiley, 1964.
- DERRIDA, J. *Writing and Difference*, Chicago: University of Chicago Press, 1978.
- FEMIA, Joseph V. *Gramsci's Political Thought, hegemony, consciousness, and the revolutionary process*, Clarendon Press, Oxford, 1987.
- GRAMSCI, Antonio. *Selection from Prison Notebooks*, New left Books, 1971.
- HABERMAS, Juergen. *Knowledge and Human Interest*, London: Heinemann, 1972.
- HERYANTO, Ariel. "Kekerasan Politik" dalam *Forum Keadilan* edisi No. 23 Tahun V, 24 Februari 1997.
- LASH, Scott. *Sociology of Postmodernism*. London: Routledge, 1990.
- MARCUSE, Herbert. *One Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society*, Boston: Beacon Press, 1964.

